

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)  
TAHUN ANGGARAN 2018  
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

*Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR RI:  
**Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA**  
Anggota Nomor: A-65*

---

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera untuk kita semua,***

Yang Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang  
Yang Terhormat, Saudara Anggota Dewan  
Yang Terhormat, Saudara Menteri Keuangan RI  
Serta Hadirin sekalian yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita dapat melaksanakan Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan bagaimana mengelola dan mengatur bangsa dan negara, sehingga kita patut meneladani beliau untuk demi terwujudnya peradaban Indonesia *Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghafur*.

Masih dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72, perkenankan kami atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengajak kepada seluruh peserta sidang paripurna dan rakyat Indonesia pada umumnya, untuk tidak melupakan jasa para pahlawan kita, terlebih para kyai dan alim ulama, serta para santri yang ikut andil berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Mari kita jadikan momentum Hari Kemerdekaan ini menjadi titik tolak penerus perjuangan para pahlawan untuk menuju kebangkitan bangsa serta mencapai kemerdekaan Indonesia lahir dan batin.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang APBN TA 2018 beserta Nota Keuangannya.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia harus didorong untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. FPKB memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2018 yang bertemakan “*Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan*” ini harus dikawal dan dipastikan telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah dengan misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat (*tahqiqul 'adli li ishlahi ar-ra'iyah*)

Dapat kita sadari bersama bahwa 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) periode 2015-2019. FPKB berharap desain kebijakan fiskal pada RAPBN 2018 ini harus menjadi ajang pembuktian Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dalam mencapai seluruh target prioritas dan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif. FPKB memandang bahwa kebijakan fiskal yang dalam tiga tahun ini lebih berorientasi pada jangka menengah-panjang melalui pembangunan infrastruktur memang penting dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Meski demikian, orientasi kebijakan fiskal jangka pendek sebagai langkah *counter cyclical* terhadap kondisi ekonomi yang masih lesu hingga saat ini juga sangat perlu diprioritaskan.

Atas dasar itu, FPKB mendorong agar strategi dan kebijakan fiskal 2018 diarahkan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, serta berdaya tahan untuk mengendalikan resiko yang terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Desain RAPBN 2018 perlu diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan struktural, serta mempersempit kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan wilayah. FPKB menilai asumsi makroekonomi dan indikator kesejahteraan, postur anggaran, serta skema resiko fiskal harus dibangun bukan hanya melihat pada hitungan kuantitatif semata. Seluruh komponen APBN 2018 harus didasari pada kondisi nyata saat ini dan masalah ke depan yang dihadapi oleh segenap rakyat Indonesia hingga ke pelosok negeri.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017 lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan asumsi-asumsi makro yang melandasi penyusunan RAPBN 2018. Pemerintah juga secara konsisten mengikutsertakan indikator-indikator kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi yang inklusif. Menanggapi asumsi makro dan indikator kesejahteraan tersebut, FPKB mencatat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 persen.** Pada dasarnya FPKB memahami bahwa pemerintah terus mencoba untuk lebih realistis dalam menentukan target pertumbuhan di 2018. Meski demikian, FPKB menilai target tersebut masih terlampau optimis untuk dicapai jika melihat capaian pertumbuhan ekonomi di 2017 yang diperkirakan maksimal hanya tumbuh mencapai angka 5,1 persen. Artinya diperlukan pertumbuhan 0,3 persen dari capaian tahun 2017 yang tentu tidak mudah untuk mewujudkannya mengingat sejumlah persoalan struktural yang masih diderita. Dari sisi sektoral, sektor *tradable* yang berkontribusi besar bagi PDB dan penyediaan lapangan kerja, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat ketimbang sektor *non-tradable*. Dari sisi penggunaan, konsumsi Rumah Tangga diperkirakan masih akan tertekan mengingat daya beli rakyat masih berada dalam masa pemulihan. Kinerja investasi setelah dikeluarkannya berbagai paket kebijakan ekonomi juga belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena investasi belum efisien. Belanja pemerintah juga belum optimal dalam mendorong pertumbuhan akibat penyerapan belanja yang masih terkonsentrasi di akhir kuartal dan kualitasnya juga belum sesuai ekspektasi. Selain itu, fenomena peralihan bisnis dari konvensional ke digital yang belum direspon secara aktif oleh pemerintah juga menjadi ganjalan pertumbuhan ekonomi untuk dapat melejit di 2018. Dengan sejumlah kompleksitas tersebut, FPKB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di 2018 dapat tumbuh maksimal di angka 5,3 persen.
- 2. Inflasi sebesar 3,5 persen.** FPKB mengapresiasi kinerja pemerintah dan Bank Indonesia yang dalam dua tahun terakhir dapat menekan angka inflasi dibawah 4 persen sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun, khusus di 2017, inflasi diprediksi meningkat akibat pencabutan subsidi listrik secara berturut-turut di awal 2017. Meski demikian, FPKB menghimbau bahwa kondisi inflasi yang semakin rendah ini tentu harus diwaspadai mengingat inflasi rendah diikuti dengan perlambatan konsumsi rumah tangga. Potensi inflasi yang cukup tinggi di tahun 2018 juga perlu diwaspadai mengingat tren harga minyak dunia yang semakin naik dan dapat berimbas pada geliat ekonomi rakyat. Disamping itu, inflasi harga bergejolak meski masih dapat ditekan dalam beberapa waktu terakhir, patut terus diawasi pergerakannya. Kondisi infrastruktur

dan logistik yang belum memadai, khususnya implementasi tol laut yang masih jauh dari harapan serta tantangan perubahan iklim, dan belum berhasilnya program kedaulatan pangan secara menyeluruh menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk menjaga stabilitas inflasi bergejolak. Melihat sejumlah tantangan ke depan, FPKB berpendapat bahwa inflasi masih belum menjauh dari angka 4 persen di 2018.

3. **Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar senilai Rp 13.500.** FPKB memandang bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi berbagai tantangan global. Kenaikan The Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan kembali terjadi di 2018 seiring dengan perbaikan perekonomian AS. Kondisi itu dapat memungkinkan terjadinya *capital flow* dan pengetatan likuiditas di pasar global. Pelemahan mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok beserta dinamika politik global juga ikut menekan Rupiah sehingga memperkecil ruang pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mendorong aktivitas perekonomian. Meski begitu, penguatan fundamental perekonomian yang ditunjukkan oleh kinerja positif neraca pembayaran, penguatan cadangan devisa, serta didukung peningkatan rating kredit Indonesia seharusnya menjadi sentimen positif penguatan dan stabilitas nilai Rupiah. Pada tataran ini, Pemerintah diharapkan tidak sekedar berorientasi pada ekspor, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi industri dalam negeri yang sebagian besar barang bahan baku dan modalnya masih perlu diimpor sebagai keberlanjutan strategi substitusi impor. Dengan pertimbangan tersebut, FPKB berpandangan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar pada 2018 masih dapat dijaga pada batas Rp 13.400 seperti pada APBNP 2017.
4. **Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen.** FPKB menilai di tengah gencarnya pemerintah menambah utang, tentu asumsi suku bunga SPN 3 bulan menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar tidak menambah beban APBN dalam jangka menengah-panjang. Data menunjukkan bahwa rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan perpajakan semakin naik dari 13 persen di 2016, mencapai 14,8 persen pada outlook 2017. Bunga utang juga terus menggerogoti belanja pemerintah pusat di mana telah mengambil alokasi sebesar 16 persen pada outlook 2017, yang melebihi alokasi belanja modal. Dengan kondisi penerimaan perpajakan yang masih lesu, biaya utang yang ditanggung harus dimitigasi dengan cermat. Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu berkoordinasi dan sinergi dalam menghadapi pengetatan likuiditas global dan tantangan domestik fiskal yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, FPKB berpendapat target rata-rata suku bunga harus berani dipatok pemerintah lebih rendah dari 5,3 persen atau minimal sama dengan target di tahun 2017 yaitu sebesar 5,2 persen.

5. **Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) senilai 48 US Dollar per barrel.** FPKB memandang trend kenaikan harga minyak dunia semakin meningkat sebagai dampak proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang berangsur membaik. Kondisi geopolitik beberapa Negara OPEC maupun non-OPEC yang belum stabil juga berpotensi mengerek harga minyak dunia di 2018. Badan Energi AS (EIA) menunjukkan bahwa harga minyak Brent, yang sekarang menjadi acuan ICP Indonesia, diproyeksi naik mencapai 51,58 US dollar per barrel di 2018. Melihat kondisi itu, FPKB berpendapat bahwa harga ICP di 2018 dapat menyentuh harga di kisaran 48-50 US Dollar per barrel. Kenaikan harga minyak mentah ini di satu sisi dapat menambah penerimaan migas, namun pemerintah juga harus mewaspadai kenaikan biaya subsidi energi yang ditimbulkan.
  
6. **Penetapan lifting minyak sebesar 800 ribu barrel/hari dan lifting gas sebesar 1.200 ribu barel setara minyak/hari.** Sebagaimana diketahui bawah lifting minyak maupun gas bumi masih menghadapi tekanan penurunan produksi alamiah pada sumur migas dan banyak fasilitas produksi yang sudah tua. Kondisi harga minyak di level rendah juga menyebabkan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) menunda rencana kegiatan investasi baik eksplorasi, pengembangan, maupun produksi. Oleh sebab itu, FPKB menghimbau agar upaya perbaikan iklim investasi dan skema kontrak bagi hasil dapat mendorong kegiatan eksplorasi serta menguntungkan bagi pemerintah dan KKKS. Disamping itu, kinerja lifting gas bumi juga masih menghadapi resiko rendahnya penyerapan di pasar. Pemerintah diharapkan terus mendorong pembangunan infrastruktur sehingga hasil produksi gas dapat terserap memenuhi kebutuhan domestik baik industri, rumah tangga dan keperluan transportasi. FPKB mendorong target lifting minyak dapat mencapai 810 ribu barrel/hari dan lifting gas bumi juga dapat ditingkatkan mencapai 1.220 ribu barrel/hari.
  
7. Selain berbagai indikator makro tersebut, indikator kesejahteraan juga sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka merajut tatanan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. **Tingkat pengangguran terbuka ditarget pada kisaran 5,0-5,3 persen.** Agar bisa mencapai target tersebut tentu kebijakan Pemerintah harus diarahkan untuk mendorong kembali tumbuhnya industri manufaktur yang padat pekerja mengingat struktur lapangan kerja saat ini masih didominasi oleh sektor informal. **Angka kemiskinan ditarget pada kisaran 9,5-10 persen yang tentu menjadi pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah.** Selain itu, target kemiskinan juga diharapkan tidak dilihat secara umum saja, namun juga harus dilihat bahwa angka kemiskinan pedesaan hingga Maret 2017 sebesar 13,9 persen jauh lebih tinggi ketimbang kemiskinan umum nasional sebesar 10,64 persen maupun kemiskinan di perkotaan sebesar 7,72 persen. FPKB berharap bantuan bersifat langsung dan instrumen dana desa di

2018 dapat mereduksi kemiskinan di pedesaan secara signifikan. **Lebih dari itu, target indeks Gini sebesar 0,38 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5** juga harus dicermati oleh pemerintah untuk fokus pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah yang menjangkau wilayah timur dan terluar Indonesia.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Setelah mencermati postur RAPBN tahun 2018 yang diajukan oleh pemerintah, maka FPKB memandang perlu memberikan beberapa catatan penting, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dalam RAPBN 2018 ditarget sebesar Rp 1.878,4 triliun atau naik tipis 8,2 persen dari APBNP 2017. Komponen Pendapatan Negara disumbang oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1609,3 triliun (85,6%), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 267,8 triliun (14,2%) dan Penerimaan Hibah sebesar Rp. 1,2 triliun (0,05%). FPKB memandang bahwa di tengah gencarnya Pemerintah melakukan kebijakan ekspansif maka Pendapatan Negara sebagai mesin kebijakan fiskal harus dipacu secara optimal agar tidak tergantung pada pembiayaan yang bersumber dari pinjaman maupun utang.

FPKB menilai target penerimaan perpajakan sebagai kontributor utama pendapatan tentu kembali menjadi sorotan. Meski target penerimaan perpajakan di 2018 hanya naik 9,3 persen dari outlook 2017, target perpajakan itu dinilai cukup moderat dan masih terlanjur optimis. Jika dihitung dengan realisasi penerimaan perpajakan di 2017 yang diproyeksi maksimal mencapai 97 persen dari outlook, maka pertumbuhan penerimaan perpajakan di 2018 mencapai 12,6 persen. Kondisi ini tentu tidak mudah mengingat pada 2018, pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan uang tebusan dari program pengampunan pajak yang membantu kinerja pajak di awal tahun 2017. Selain itu, pertumbuhan PPh Non-Migas yang ditarget tumbuh cukup tinggi seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi yang meningkat di 2018 juga harus dihitung secara cermat oleh Pemerintah. Hal itu mengingat upaya menambah basis data pajak dari implementasi regulasi keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dalam jangka pendek agaknya masih sulit diwujudkan. FPKB juga menghimbau kepada pemerintah agar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jangan sampai memberatkan industri perkebunan rakyat seperti gula dan karet, yang justru dapat mematikan usaha mereka.

Melihat kondisi itu, FPKB menilai bahwa Pemerintah wajib memaksimalkan berbagai upaya untuk mengejar target penerimaan pajak

dan meningkatkan *tax ratio*. Sejumlah upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain:

*Pertama*, tidak menyalakan potensi pajak dari piutang macet yang pada akhir 2016 mencapai Rp 60,5 triliun mengingat Rp 21,7 triliun terbuang sia-sia pada daluarsa pajak di tahun 2016 lalu.

*Kedua*, meningkatkan basis data pajak baik yang berasal dari program pengampunan pajak maupun regulasi keterbukaan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan;

*Ketiga*, mendorong keberlanjutan reformasi di bidang perpajakan melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);

*Keempat*, optimalisasi dan peningkatkan kualitas di bidang administrasi dan teknologi serta sumber daya manusia;

*Kelima*, mengoptimalkan potensi pajak dari bisnis digital dan *e-commerce*.

Di sisi lain, PNBPN ditargetkan tumbuh tipis sebesar Rp 267,8 triliun atau 2,9 persen dari target APBNP 2017. FPKB berharap performa PNBPN di tahun 2018 dapat membantu kinerja penerimaan pajak yang masih bergelut dengan berbagai macam tantangan. PNBPN Sumber Daya Alam (SDA) Migas dapat digenjot melalui peningkatan lifting migas dengan penerapan teknologi terkini yang tepat guna serta implementasi penerapan *Production Sharing Contract* (PSC) dengan skema *gross split* menggantikan mekanisme *cost recovery* yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Selain itu, PNBPN SDA non Migas, khususnya mineral dan batubara juga sangat penting diperhatikan mengingat fluktuasi harga komoditas global belum menunjukkan perbaikan berarti dan di berada di level yang stagnan. Secara khusus, FPKB mempertanyakan turunnya target PNBPN Perikanan yang mengindikasikan kebijakan pemerintah hingga saat ini belum optimal dalam menggali potensi perikanan yang begitu besar. Lebih lanjut, FPKB menghimbau agar PNBPN yang berasal dari dividen BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dapat dikelola secara lebih optimal seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang kian membaik dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kebijakan **Belanja Negara** dalam RAPBN 2018 untuk mencapai pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan pemerintah yang di rencanakan sebesar Rp.2.204,4 triliun dengan rincian alokasi untuk **Belanja Pemerintah Pusat** sebesar Rp.1.443,3 triliun dan anggaran **Transfer ke Daerah dan Dana Desa** sebesar Rp.761,1 triliun harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, FPKB meminta Pemerintah terus meningkatkan tatakelola keuangan negara yang lebih

akuntabel, sehingga dapat mengatasi buruknya penyerapan anggaran belanja negara yang selalu terulang setiap tahun.

FPKB berpendapat bahwa peningkatan kualitas tata kelola Belanja Negara baik berupa **kebijakan Belanja Pemerintah Pusat** yaitu **belanja K/L** maupun **belanja Non K/L** apabila pemerintah konsisten meningkatkan alokasi belanja negara untuk pembangunan sektor-sektor unggulan. Oleh karena itu, untuk mendorong transformasi perbaikan kualitas belanja negara, maka FPKB mendesak pemerintah **agar meninjau kembali** besarnya alokasi belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2018 yang termasuk *nondiscretionary spending* lainnya, seperti untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp.247,6 triliun atau naik 13,3 persen dibandingkan anggaran tahun 2017.

Secara khusus, FPKB menyambut baik ditingkatkannya anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2018 menjadi Rp. 409,0 triliun sehingga diharapkan target pembangunan infrastruktur pemerintah dapat memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian nasional. Selain itu, FPKB juga mengapresiasi atas konsistensi pemerintah untuk tetap memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai ketentuan UU yang berlaku. Terkait pemanfaatan alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, FPKB meminta pemerintah untuk memperhatikan alokasi anggaran pendidikan khusus **untuk madrasah dan pesantren** di Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing SDM dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Lebih lanjut, FPKB menghargai usaha Pemerintah untuk mulai fokus pada kebijakan jangka pendek melalui penambahan subsidi dan berbagai program perlindungan sosial. Meski demikian, FPKB meminta kepada Pemerintah agar kebijakan tersebut diiringi dengan tolak ukur yang jelas dan konkret dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta mempersempit jurang ketimpangan. Alokasi anggaran subsidi sebesar Rp.172.4 triliun, yaitu subsidi energi sebesar Rp.103,4 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp.69,0 triliun serta berbagai program perlindungan sosial harus disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.

FPKB secara tegas berpendapat bahwa rencana kebijakan penghapusan subsidi benih yang akan dintegrasikan pemerintah dengan program bantuan langsung benih unggul (BLBU) kepada para petani melalui bantuan sosial K/L harus didukung basis data yang transparan dan menggunakan sistem penyaluran subsidi yang kredibel dan akuntabel. FPKB juga menghimbau agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menyalurkan Bantuan Langsung Pangan Non Tunai (BLPNT) mengingat banyak daerah kantong kemiskinan belum semua memiliki jaringan internet yang baik. Lebih lanjut, terkait dengan Program Keluarga

Harapan (PKH) yang meningkat dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM harus diiringi dengan evaluasi dan perbaikan dalam penggunaan single database agar benar-benar tepat sasaran.

Mengenai alokasi anggaran **Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa**, FPKB berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan kembali besaran alokasi yang ideal antara belanja Pemerintah Pusat dengan Belanja transfer ke daerah dengan memperhatikan besaran kebutuhan pendanaan daerah dengan pembagian urusan pemerintahan. FPKB berpendapat bahwa perlu adanya sinkronisasi dan proses komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan mekanisme baru penyaluran dana transfer dan dana desa yang berbasis pada kinerja penyerapan dana dan pencapaian output.

FPKB memandang bahwa dana Transfer ke Daerah sebesar Rp.701,1 triliun dalam RAPBN 2018 yang dibagi *pertama*, Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil/ DBH dan Dana Alokasi Umum/ DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik), *kedua*, Dana Insentif Daerah (DID) serta *ketiga*, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY ini bisa dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah.

FPKB secara spesifik memandang bahwa rencana penerapan pagu Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dalam APBN yang bersifat tidak final mengikuti dinamika PDN Neto, serta penyempurnaan formulasi DAU dengan bobot alokasi dasar (gaji PNSD) yang semakin menurun secara gradual dapat meningkatkan kualitas belanja negara. Demikian juga dengan kewajiban penggunaan minimal 25 persen anggaran dari DBH dan DAU untuk mendanai belanja infrastruktur akan mempercepat pemenuhan layanan dasar publik di daerah.

Terkait anggaran **Dana Desa** sebesar Rp.60 triliun dalam RAPBN 2018 atau meningkat 3,1 persen dari anggaran 2017, FPKB meminta agar implementasi pengalokasian Dana Desa di tahun ke-empat -nya nanti dapat difungsikan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara desa-kota, mendorong kemandirian desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk itu, distribusi dana desa yang direncanakan diberikan kepada 74.958 desa diseluruh Indonesia ini harus berlandaskan sistem perencanaan yang komprehensif dan dibarengi dengan peningkatan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan sehingga dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya.

3. FPKB memandang bahwa Kebijakan **Defisit dan Pembiayaan Anggaran** pada RAPBN 2018 sebesar defisit 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebanding dengan nominal Rp.325,9 triliun merupakan konsekuensi logis dari dipilihnya kebijakan *fiskal ekspansif* oleh pemerintah. FPKB meminta pemerintah dalam pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN melalui pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya harus dikelola secara cermat dan hati-hati. Rencana pemerintah untuk mengambil pembiayaan defisit anggaran lewat sumber pembiayaan utang dengan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN neto) sebesar Rp. 414,7 triliun di tahun 2018 agar terus memperhatikan *volatilitas* perkembangan pasar SBN dalam negeri dan mencermati akan resiko sewaktu-waktu terjadinya *sudden reversal* atau pembalikan dana asing secara tiba-tiba, mengingat sampai semester I 2017 yang lalu porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan sudah mencapai 39,47%, dan terakhir juga perlu diingat bahwa Indonesia sampai sekarang masih penganut rezim devisa bebas. Lebih lanjut, Pemerintah dan Bank Indonesia juga harus aktif berkoordinasi untuk mengantisipasi terjadinya perebutan dana di pasar yang dapat mengakibatkan tingginya suku bunga perbankan dan berdampak negatif bagi likuiditas domestik.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan, Menteri Keuangan, Serta Hadirin Yang Terhormat,**

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya. Dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya agar RUU APBN TA 2018 beserta Nota Keuangannya ini dapat dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas segala perhatian yang diberikan, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridloannya. Amin.

***Wallahul Muwaffiq llaa Aqwamith Thoriq,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jakarta, 24 Agustus 2017

**PIMPINAN,  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**

**Dra. Hj. Ida Fauziyah. M.Si**  
Ketua

**H. Cucun Ahmad Syamsurizal S.Ag**  
Sekretaris